

## TAJUK RENCANA

### Waspada Peningkatan Kasus Covid-19 pada Anak

**PERTENGAHAN** Juni 2021 ada tren peningkatan kasus Covid-19 pada anak-anak di berbagai daerah. Sedang untuk wilayah DIY belum ada data yang riil. Meski demikian, sebagaimana disampaikan Ketua Kelompok Kerja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKMKM) UGM dr Gunadi SpBA PhD, tren kasus Covid-19 pada anak-anak mengalami kenaikan saat ini, kemungkinan hal ini ada kaitannya dengan varian delta (KR 22/6). Terkait hal itu Kemenkes meminta pihaknya membantu memeriksa sampel kasus, baik sampel dewasa maupun anak-anak dari Solo Raya, DIY, dan DKI Jakarta pada pertengahan Juni 2021.

Bila varian delta mulai menyerang anak-anak, tentu itu yang kita khawatirkan selama ini. Anak-anak selain rentan terpapar virus Korona, juga berpotensi menjadi sumber penularan. Terlebih, khusus varian delta yang berasal dari India ini, efeknya lebih berat ketimbang varian lainnya. Lantas, bagaimana cara kita melindungi anak-anak?

Kita mendukung sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meminta pemerintah menyiapkan vaksin Covid-19 untuk anak-anak. Sebab vaksin yang selama ini digunakan yakni Sinovac dan AstraZeneca belum bisa diperuntukkan bagi anak-anak. Selain itu anak-anak tetap diharuskan memakai masker sebagai alat pelindung, juga harus dihindarkan dari segala aktivitas yang bersifat kerumunan. Padahal, seperti banyak kita lihat di tempat-tempat umum atau area publik, anak-anak terkadang tidak memakai masker sehingga rentan tertular virus.

Selain cara tersebut, pencegahan bisa dilakukan antara lain dengan tidak tergesa-gesa untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Sekalipun kegiatan belajar-mengajar secara daring ini mungkin membosankan dan kurang efektif, namun itulah alternatif yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Tentu saja, ini menjadi tantangan bagi orang tua maupun guru untuk menciptakan inovasi belajar mengajar secara daring agar tidak membosankan.

La ngkah pemerintah pusat, yang juga diikuti pemerintah daerah, untuk memperkuat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai Rabu kemarin, kiranya tepat dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19. Khusus kegiatan belajar mengajar, pada zona merah secara daring zona lainnya sesuai pengaturan dari Kemendikbudristek dengan penerapan prokes lebih ketat. Hemat kita, untuk wilayah DIY, sebaiknya tidak tergesa menggelar pembelajaran tatap muka (PTM), terlebih saat ini jumlah kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya.

Tentu kita tidak berharap lonjakan kasus Covid-19 di DIY berubah menjadi ledakan besar, apalagi saat ini DIY menduduki peringkat kelima nasional dari segi jumlah orang yang terpapar virus Korona. Sebaliknya, kita berharap lonjakan kasus di DIY yang sehari bisa mencapai 600 lebih kasus menjadi puncak jumlah tertinggi dan untuk selanjutnya menurun secara bertahap. Harapan itu bisa terwujud kalau kita disiplin menerapkan prokes.

Lebih dari itu, kita mendorong Satgas Covid-19, mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan, lebih ketat dalam melakukan pengawasan, khususnya dalam memperkuat pelaksanaan PPKM di berbagai daerah. Kini tak boleh lagi ada toleransi terhadap pelanggaran prokes. Semua pelanggaran harus ditindak tegas. □

**BANK** Indonesia (BI) terus membuat terobosan di ranah sistem pembayaran. Hasil rapat Dewan Gubernur BI periode Juni 2021 memutuskan perpanjangan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit (*credit card*) 1% (atau maksimum Rp 100.000) sampai dengan 31 Desember 2021. Kebijakan tersebut selaras dengan langkah yang telah diambil BI. Mei lalu BI memangkas suku bunga maksimum kartu kredit dari semula 2% menjadi 1,75% per bulan yang berlaku mulai 1 Juli 2021. Keduanya ditujukan untuk menyokong transmisi kebijakan moneter dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional.

Didukung kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif, kredit konsumsi yang memiliki porsi 28,2%, diharapkan akan terkerek. Peningkatan konsumsi menjadi target yang hendak dicapai. Dalam lingkup industri keuangan, relaksasi tersebut niscaya akan menciptakan 'arena bermain' yang adil antarmetode pembayaran non tunai, seperti uang elektronik (*e-money*) dan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*). Persaingan yang sehat antarmetode pembayaran non tunai akan berujung pada efisiensi transaksi non tunai.

#### Persoalan Mendasar

Kendati bertujuan positif, perpanjangan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit tidak lepas dari sejumlah persoalan mendasar. Pertanyaan pertama yang muncul menyangkut pada efektivitasnya. Denda keterlambatan pembayaran kartu kredit pada 2020 (sebelum diperpanjang), misalnya, bisa menjadi pelajaran.

Data menunjukkan sepanjang Januari 2020 hingga Maret 2021, rata-rata nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp 19,7 triliun, jauh lebih rendah dari masa sebelum pandemi yang menembus Rp 28,6 triliun. Artinya, regulasi denda keterlambatan pembayaran kartu kredit tidak efektif memacu nilai transaksi.

Jika ditelisik lebih lanjut, penurunan transaksi kartu kredit paling besar ter-

#### Haryo Kuncoro

jadi di sektor yang berkaitan dengan laku pesiar. Dengan demikian, selama pembatasan kegiatan masyarakat belum dicabut, ekspektasi industri jasa pembayaran kartu kredit atas peningkatan nilai transaksi praktis sulit terealisasi. Walaupun pembatasan kegiatan masyarakat sudah dikendorkan, persoalan tidak berhenti sampai di sini.

Demikian pula, pemotongan suku bunga maksimum kartu kredit akan



layanan kartu kredit akan menaikkan denda. Saat pelonggaran pembayaran denda 1% diperpanjang, biaya administrasi denda niscaya menjadi bantalan.

Dilema pun terjadi. Besaran denda menjadi pemasukan ekstra bagi penyedia layanan kartu kredit sehingga implisit mereka berharap volume denda akan terus membesar. Akan tetapi, besaran denda sekaligus menjadi indikator buruknya tata kelola kredit sehingga sejauh mungkin denda bisa ditekan.

#### Menyisakan Risiko

Dari manapun cara memandang, perpanjangan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit menyisakan risiko. Kasus kredit bermasalah yang banyak muncul dari pinjaman online bisa menjadi cerminan komparasi. Tanpa pengawasan BI, perpanjangan denda keterlambatan pembayaran kartu kredit bisa kontraproduktif. Sampai di titik ini, pemahaman nasabah atas kartu kredit menjadi kunci penyeimbang. Kehati-hatian dalam memanfaatkan fasilitas 'belanja dulu, bayar kemudian' perlu dipertebal. Denda 1% untuk Rp 100.000 ekuivalen dengan kredit Rp 10 juta.

Konkretnya, nasabah mestinya bisa menempatkan kartu kredit sebagai media penyangga, alih-alih untuk transaksi rutin berbelanja. Bukan begitu? □

**\*) Prof Dr Haryo Kuncoro** Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

#### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan foto-copy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Penilaian Akhir Tahun

**PENILAIAN** Akhir Tahun (PAT) sebagai bagian dari laporan akhir tahun sekolah pada orang tua siswa adalah peristiwa penting dalam sistem persekolahan di Indonesia. Berbeda dengan tahun sebelumnya, PAT saat ini diwarnai dengan beberapa perubahan mekanisme sebagai dampak dari adaptasi kebiasaan baru di lingkungan pendidikan.

PAT di semua jenjang pendidikan harus dilaksanakan dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 1 Februari 2021 tentang mekanisme pelaksanaan PAT masa pandemi Covid-19. Meskipun PAT tidak perlu mengukur capaian kurikulum secara menyeluruh, namun mekanisme PAT tetap harus dirancang untuk mendorong aktivitas belajar siswa yang bermakna. Namun demikian, penugasan oleh guru selama pembelajaran daring menjadi bagian tak kalah penting dari proses penilaian keseluruhan.

Peran keluarga, guru dan wali kelas dalam mengkondisikan siswa selama PAT berlangsung serta pengumpulan semua tagihan secara online membutuhkan kerja ekstra keras tanpa kenal batas ruang dan waktu. Pemantauan selama dan setelah selesai PAT melalui penggalan informasi dari orang tua/wali siswa menjadi cara yang efektif agar semua tagihan dan perbaikan memperoleh hasil sesuai harapan.

PAT online secara terjadwal dengan ketentuan atau tata tertib yang harus diikuti siswa dilakukan agar proses penilaian dapat terkendali dan memperoleh hasil yang mencerminkan kemampuan menyeluruh. Pembatasan waktu login ke sistem pada saat pelaksanaan PAT dengan durasi waktu tertentu bertujuan melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Keterlambatan login dengan ber-

bagai alasan pada waktu yang ditentukan, berakibat siswa gagal mengikuti PAT sesuai jadwal dan harus menyusul di hari lain yang sudah disiapkan.

Beragamnya instrumen yang harus disiapkan untuk memotret keteserapan materi oleh siswa sebagai satu kesatuan dari penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan selama satu tahun sangat tidak mudah diaplikasikan. Selain melalui porto folio siswa, potret keteserapan materi yang berupa hasil praktik maupun karya siswa kesemuanya dilaksanakan hampir 100% online dan sulit dipastikan pertanggungjawabannya.

Selain sekelumit permasalahan di atas, beragam masalah dihadapi guru dan wali kelas dalam membuat laporan PAT kepada para orang tua siswa. Kebiasaan menunda penyelesaian tugas karena malas dan lebih memilih bermain gadget serta keterlambatan bangun pagi untuk mengikuti PAT sesuai jadwal karena kebiasaan begadang di malam hari menjadi permasalahan serius, namun dianggap biasa terjadi hampir di semua jenjang pendidikan. Kekhawatiran akan lepasnya kualitas generasi pada sebuah dekade oleh sekelompok kalangan tidaklah berlebihan jika melelehnya karakter akibat pandemi ini tidak segera teratasi dengan tepat.

Laporan akhir tahun dengan segala kekurangan dan kelemahan akibat pandemi Covid-19 menjadi pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk dicarikan jalan keluar sebagai perbaikan ke depan. Pendidikan sebagai garda terdepan dalam penyiapan generasi harus dikawal dengan lebih serius. Jalinan kerja sama yang harmonis antara sekolah, orang tua dan masyarakat harus menjadi kesadaran bersama untuk segera dioptimalkan. □

**Nurtaila Mahmudah, Guru Matematika SMKN 3 Yogya.**

## Penyelarasan Kurikulum MBKM

**TUJUAN** Pemerintah Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945 Indonesia terus dicanangkan. Perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan teknologi yang semakin canggih di era revolusi industri 4.0 menuntut pemerintah untuk melakukan reorientasi tujuan pendidikan nasional. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan. Mulai Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020. Awal 2020 Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan di bidang pendidikan tinggi melalui program 'Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)' yang diharapkan meningkatkan *link and match* peruruan tinggi dengan dunia industri.

Perubahan kurikulum pendidikan merupakan keniscayaan sepanjang tidak bertentangan dengan filosofi pendidikan serta peraturan yang berlaku. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Harapannya, kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks di era industri 4.0.

#### Mendorong

Upaya ini diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Berbagai upaya dikembangkan setiap perguruan tinggi untuk mencapai keunggulan lulusan sesuai penciri visi misi program studi. Selanjutnya untuk mendukung pencapaian hal tersebut, proses

#### Kori Puspita Ningsih

pembelajaran terus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang responsive.

Dokumen kurikulum pun dirancang dengan pendekatan Outcome Based Education (OBE). Perbaikan kurikulum secara kontinyu dengan merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) juga didasari hasil evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan. Juga *tracer study*, masukan pengguna lulusan, alumni, dan ahli dibidangnya. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan sesuai kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan setiap perguruan tinggi.

Peluang perguruan tinggi untuk bersinergi dengan industri, usaha, dan dunia kerja (iduka) salah satunya dalam hal penyelarasan kurikulum berbasis MBKM. MBKM merupakan suatu program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau di perguruan tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak).

#### 8 Kegiatan

Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS). Atau mengambil SKS di prodi yang berbeda di satu perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Sedangkan kegiatan mahasiswa yang dapat dilaksanakan di

luar kampus ada 8 jenis. Yaitu: (1) magang/praktik kerja; (2) proyek di desa atau KKN Tematik; (3) mengajar di sekolah; (4) pertukaran pelajar; (5) penelitian atau riset; (6) kegiatan wirausaha; (7) studi/proyek independen; (8) proyek kemanusiaan.

Adanya urgensi peyelarasan kurikulum berbasis MBKM, tidak luput dengan adanya sinergi iduka dan perguruan tinggi guna menjamin keberlangsungan program. Diharapkan lulusan dapat memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia berakhlak mulia. Berdasarkan pemahaman keyakinan agama dalam upaya mencetak penerus bangsa yang mampu meningkatkan derajat bangsa Indonesia. □

**\*) Kori Puspita Ningsih SKM MKM, Dosen Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret**

## Pojok KR

Industri pariwisata diimbau perkuat prokes.  
**--Tak cukup imbauan, tapi perintah bersifat wajib.** \*\*\*

Percepat pemulihan ekonomi, OJK DIY andalkan stimulus fiskal.  
**-- Diharapkan berdampak pada pelaku usaha.** \*\*\*

Erick Thohir jamin ketersediaan obat-obatan penanganan Covid-19 aman.  
**-- Harus jamin pula kemanjurannya.**

*Beraks*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirnon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswadi Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Musbahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hastho Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Gratis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkr@yahoo.com, iklandkr13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) 563125, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogyakarta - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) 496549 dan (0274) 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.